

## **Dewan Minta Temuan BPK Ditindaklanjuti**

### **LKPD di 22 Instansi Harus Diselesaikan**

**SEMARANG** - DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang tahun anggaran 2014.

Dewan menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait tersebut. Diharapkan pemkot dapat segera menyelesaikannya sesuai arahan dari BPK.

"Inspektorat adalah sebagai lembaga pengendali intern Pemkot Semarang. Kami minta mereka harus pro aktif, mengawal dan mengawasi penyelesaian temuan dan rekomendasi dari BPK oleh seluruh SKPD

yang menjadi obyek temuan, kata Ketua DPRD Kota Semarang HA Supriyadi se usai rapat koordinasi dengan Inspektorat selaku lembaga pengendali internal Pemkot kemarin.

Inspektorat diundang untuk mengetahui dan menjelaskan tindak lanjut oleh 22 SKPD yang jadi obyek temuan dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD dari BPK.

Supriyadi mengatakan, ke-22 SKPD itu sudah ada action

plan untuk temuan dari BPK. Karena itu Inspektorat harus mengawal supaya semua sesuai arahan BPK. Hasil tindak lanjut tersebut akan dilaporkan ke BPK. Kemudian, pemkot harus membahasnya lagi respons BPK atas hasil tindak lanjut tersebut. "Dalam semua proses ini, kami (Dewan) akan mengawal," ucapnya.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) jadi salah satu obyek temuan paling mencolok dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD dari BPK. Dinas ini harus menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK, yaitu agar penyimpanan kas daerah yang selama ini ada di sembilan bank dikurangi.

temuan terdiri dari 22 SKPD.

Tindak lanjut sudah ada yang dilakukan sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK diterima pada 29 Mei lalu antara lain, kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Pasar Klithikan Penggaron tahap dua senilai Rp7,5 juta pada Dinas Pasar telah disetor ke kas daerah pada 19 Mei. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Pasar Modern Rejomulyo tahap dua Rp12,9 juta juga sudah disetor ke kas daerah sewaktu 19 Mei.

Kemudian, kelebihan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan pembangunan ruang terapi pada RSUD Kota Semarang Rp5,4 juta juga sudah disetor ke

kas daerah pada 20 Mei. Dan kelebihan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan pembangunan GOR Tri Lomba Juang pada Dinas Tata Kota dan Peremukiman (DTKP) Rp74,6 juta juga disetor ke kas daerah pada 19 Mei.

Mengenai tindak lanjut atas temuan BPK lainnya, kata Cahyo Bintarum, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Sebab temuan BPK harus sudah ada tindak lanjut oleh pemkot paling lambat 60 hari kerja sejak diterimanya LHP pada 29 Mei.

"Karena itu, kami sudah melakukan langkah membuat surat perintah wali kota kepada dinas terkait, surat sekretaris daerah, action plan kesanggupan

SKPD menindaklanjuti temuan BPK, dan rekapitulasi action plan dari SKPD yang masih dalam proses ditandatangani wali kota," paparnya.

Seperti diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal ini mengundang keprihatinan dari fraksi di DPRD Kota Semarang. Pasalnya, sebelumnya opini BPK RI atas Laporan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**● m abduh**